



Peternakan merupakan salah satu komoditas yang berkontribusi nyata bagi perolehan devisa negara. Namun demikian, pengembangan peternakan masih belum optimal menyumbangkan kontribusinya untuk menanggulangi kemiskinan. Strategi peningkatan kesejahteraan peternak dapat dilakukan melalui transformasi kebijakan yang berkeadilan, yaitu: 1) pemberdayaan masyarakat di sekitarnya untuk dilibatkan dalam budi daya ternak dan penguatan organisasi, 2) pentingnya pendidikan masyarakat desa dan ketahanan pangan, 3) melestarikan dengan memperhatikan kualitas bibit, 4) akses terhadap sumber daya dan teknologi, 5) akses modal dan pasar, serta 6) kebijakan industri yang difokuskan ke agroindustri pedesaan untuk mendekatkan industri ke sentra produksi.

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETERNAK BERBASIS AGROEKOLOGI

Penulis:

Iif Syarifah Munawaroh

Fungsional Perencana Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan

email : iif.syarifah@gmail.com

Saat ini Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia berada pada urutan ke-124 dari 187 negara dan Indonesia termasuk kelompok negara berkembang. Secara keseluruhan IPM ini memiliki keterkaitan dengan kebijakan ekonomi suatu negara terhadap kualitas hidup rakyatnya. Menurut Syamsul Bahri penulis “Strategi Pembangunan Peternakan Berkelanjutan dengan Memanfaatkan Sumber Daya Lokal”, terdapat hubungan antara tingkat konsumsi protein hewani dengan tingkat harapan hidup, kualitas hidup dan pendapatan masyarakat suatu negara.

Berdasarkan data FAO tahun 2005, asupan protein hewani rata-rata dunia adalah 23,9 g/kapita/hari, negara maju 49,8 g/kapita/hari, negara berkembang 17,4 g/kapita/hari, dan

untuk Indonesia hanya 5,4 g/kapita/hari, berada pada urutan ke-158 dari 173 negara atau pada urutan ke-15 terendah. Berdasarkan data statistik asupan protein hewani penduduk Indonesia masih kurang dari 6 g/kapita/hari. Konsumsi produk ternak Indonesia sangat rendah dibandingkan dengan beberapa negara di dunia. Oleh karena itu, pembangunan peternakan di Indonesia harus difokuskan untuk meningkatkan produksi dan konsumsi produk ternak yang merupakan sumber protein hewani.

Kebutuhan pangan asal ternak akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, peningkatan pendapatan masyarakat dan kesadaran gizi, urbanisasi, dan terjadinya perubahan pola makan. Kontribusi asupan protein asal ternak

terhadap total konsumsi protein penduduk Indonesia hanya 10,1%, sedangkan kontribusi protein asal ternak dunia 27,9% dan untuk negara berkembang rata-rata 22,9%.

KEMISKINAN DAN PERMASALAHAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN

Peternakan merupakan salah satu komoditas yang berkontribusi nyata bagi perolehan devisa negara. Namun demikian, pengembangan peternakan masih belum optimal menyumbangkan kontribusinya.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan peternakan, di antaranya: a) masih rendahnya sumber bibit dan optimalisasi plasma nutfah

lokal sebagai bibit unggul nasional, b) belum optimalnya pengelolaan sumber daya pakan lokal, c) efisiensi dan produktivitas masih rendah, d) rendahnya pemanfaatan peluang ekspor, e) kualitas produk peternakan yang belum sesuai standar, f) sarana dan infrastruktur publik yang kurang mendukung, g) belum optimalnya pencapaian pemenuhan gizi nasional, serta h) kualitas sumber daya manusia dan isu-isu global terkait lingkungan yang terdampak akibat usaha peternakan. Produksi peternakan dinilai tidak berkelanjutan serta belum menerapkan prinsip-prinsip konservasi dan ramah lingkungan serta belum menerapkan konsep peternakan organik. Walaupun sudah ada yang menerapkan, jumlahnya masih sangat kecil.

Berdasarkan data FAO, dalam meningkatkan produktivitas dan produksi pangan dunia, inovasi teknologi memainkan peranan yang sangat besar, yaitu sekitar 80%. Peran perluasan lahan pertanian hanya berperan 20% karena sumber daya lahan sudah sangat terbatas. Demikian

juga dengan upaya meningkatkan produktivitas dan produksi ternak. Sebagai contoh, penelitian pemuliaan ayam lokal unggul saat ini sudah mencapai puncaknya dalam menghasilkan galur ayam pedaging yang dapat mencapai berat tubuh maksimal dengan efisiensi pakan yang tinggi dalam waktu yang relatif cepat.

Salah satu contoh masalah sosial yang multidimensi adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan fenomena yang terjadi hampir di semua negara berkembang dan negara miskin. Menurut Mulok 2015, kemiskinan timbul karena ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sampai pada taraf yang dianggap manusiawi.

Pembangunan nasional merupakan upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Kegiatan pembangunan nasional diarahkan pada pembangunan daerah khususnya yang relatif miskin. Pembangunan daerah dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan sasaran pembangunan nasional

yang ditetapkan melalui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek.

Salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan adalah terjadinya penurunan jumlah penduduk miskin. Efektivitas dalam menurunkan jumlah penduduk miskin merupakan bagian strategi pembangunan. Hal ini berarti salah satu kriteria utama pemilihan sektor titik berat pembangunan nasional adalah efektivitas dalam penurunan jumlah penduduk miskin.

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SEBAGAI PERJALANAN PEMBANGUNAN BANGSA

Kesejahteraan rakyat merupakan tujuan hakiki dalam perjalanan pembangunan bangsa. Kesejahteraan berhubungan erat dengan konsep kualitas hidup (*quality of life*). Menurut Hertzmark dalam tulisannya "*The Effect of Economic Growth on Nutrition*", secara terminologi kesejahteraan adalah *standard living, well-being*,



Gambar1. Peternakan berbasis agroekologi

welfare, dan quality of life. Sedangkan ekonomi kesejahteraan adalah bagian dari kesejahteraan sosial yang dapat dikaitkan secara langsung maupun tidak langsung dengan pengukuran uang. Sementara itu, menurut Easterly W dalam buku "The Elusive Quest for Growth. Economists Adventures and Misadventures" mendefinisikan bahwa kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi dalam masyarakat, yaitu: "A state or condition of human well-being that exists when social problems are managed, when human needs are met, and when social opportunities are maximized".

Kesejahteraan yang dimaksud dalam UUD 1945, baik dalam bagian pembukaan dan Bab XIV serta dalam UU No. 11/2009 mempunyai padanan secara internasional dengan "The achievement of social welfare means, first and foremost, the alleviation of poverty in its manifestations". Social welfare yang dimaksud dapat diartikan sebagai kesejahteraan, kesejahteraan umum, ataupun kesejahteraan sosial. Kesejahteraan merupakan konsep yang abstrak karena keberadaannya terkait langsung dengan nilai-nilai hidup dan ideologi yang dianut oleh seseorang.

Parameter umum yang sesuai dengan kondisi Indonesia dalam mengukur kesejahteraan masyarakat, antara lain: parameter ekonomi, perumahan, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, spritualitas, rekreasi, dan jaminan sosial. Kesejahteraan dapat dilihat dari dua pendekatan, yaitu kesejahteraan objektif dan kesejahteraan subjektif. Kesejahteraan subjektif dapat menggambarkan berbagai aspek dalam kehidupan, antara lain: lapangan pekerjaan, aktivitas ekonomi, tingkat independensi, dan semangat hidup. Kesejahteraan objektif adalah tingkat kesejahteraan individu atau kelompok masyarakat yang diukur secara rata-rata dengan patokan tertentu, baik

ukuran ekonomi, sosial maupun ukuran lainnya.

PEMBANGUNAN PERTANIAN BERKELANJUTAN BERBASIS AGROEKOLOGI

Pertanian berkelanjutan adalah suatu gerakan di bidang pertanian yang menerapkan prinsip-prinsip ekologi, studi yang ada kaitannya dengan organisme dan lingkungan. Pembangunan pertanian berkelanjutan yang dilandaskan pada konsep agroekologi memang sudah saatnya dikembangkan. Hal tersebut dikarenakan seringnya bencana alam akibat eksploitasi sumber daya alam, kerusakan lingkungan, penurunan sumber daya hutan dan degradasi. Selain itu, eksploitasi sumber daya biomassa, hilangnya jutaan keanekaragaman biologis serta keamanan pangan.

Dalam tulisan "Risk Status of Selected Indigenous Chicken Breeds in Java, Indonesia: Challenges and Opportunities for Conservation" oleh Asmara, menyebutkan bahwa prinsip menuju suatu kesamaan dalam memanfaatkan sumber daya alam perlu dibangun, yaitu: 1) efisiensi (*the principle of efficiency*) sumber daya. Sumberdaya tidak dieksploitasi secara berlebihan, 2) sufisiensi (*the principle of sufficiency*) pembatasan pemanfaatan sebagai upaya dalam penyediaan sumber daya pada generasi yang akan datang, 3) konsistensi (*the principle of consistency*) yang menekankan perlunya kompatibilitas antar-subsistem dan dengan *superior system* secara keseluruhan, dan 4) pencegahan (*the principle of precaution*) mengarah pada upaya melindungi alam dari proses degradasi.

Dalam buku "Merevolusi Revolusi Hijau" yang diterbitkan oleh IPB Press, Pembangunan berkelanjutan memiliki pilar yang harus dipenuhi, yaitu: 1) secara ekonomi fisible (*economically feasible*) untuk membentuk suatu sistem produksi jangka panjang, 2) penggunaan teknologi yang sepadan (*technologically appropriate*), 3) secara lingkungan tidak merusak dan berkelanjutan (*environmentally sound and sustainable*), dan 4) secara sosial dan budaya dapat diterima (*socially and acceptable*).

Pengembangan peternakan menjadi bagian dari pembangunan pertanian berkelanjutan yang memiliki agenda yang mencakup 4 dimensi, yaitu: 1) dimensi sosial, 2) sumber daya sebagai aset produksi dalam pembangunan, 3) peningkatan peranan masyarakat, dan 4) program aksi/ implementasi.

PETERNAKAN MODERN BERWAWASAN LINGKUNGAN

Sesuai dengan karakter yang lebih dinamis, revolusi peternakan mensyaratkan tidak hanya pada aspek peningkatan kapasitas sistem produksi dan distribusi, tetapi juga pada aspek antisipasi permasalahan lain, yaitu peternakan modern berwawasan lingkungan dengan mengacu pada prinsip berkelanjutan berbasis pakan organik, kerakyatan berbasis sumber daya lokal dan terintegrasi berbasis ekstensifikasi. Penerapan prinsip-prinsip tersebut pada setiap aspek usaha peternakan akan memberikan dampak positif secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Potensi sumber daya lokal terkait dengan bibit, pakan dan bahan pakan, serta kearifan lokal untuk menghasilkan produk peternakan organik.



Gambar 2. Peternakan Modern berwawasan lingkungan dengan pemanfaatan teknologi

STRATEGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETERNAK DAN TRANSFORMASI KEBIJAKAN

Strategi peningkatan kesejahteraan peternak dapat dilakukan melalui tranformasi kebijakan yang berkeadilan, yaitu: 1) pemberdayaan masyarakat di sekitarnya untuk dilibatkan dalam budi daya ternak dan penguatan organisasi, 2) pentingnya pendidikan masyarakat desa dan ketahanan pangan, 3) melestarikan dengan memperhatikan kualitas bibit, 4) akses terhadap sumber daya dan teknologi, 5) akses modal dan pasar, serta 6) kebijakan industri yang difokuskan ke agroindustri pedesaan untuk mendekatkan industri ke sentra produksi.

Fokus terhadap budi daya peternakannya saja tidak akan menjamin peningkatan kesejahteraan, namun perlu terintegrasi antara *on*

farm dengan pengolahan (industri) dan pemasaran, sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan dalam membangun agribisnis peternakan yang identik dengan membangun desa. Pembangunan agribisnis peternakan, di antaranya: 1) membangun perbibitan yang ditangani oleh pemerintah pusat yang memiliki unit pelaksana teknis di daerah atau pemerintah daerah setempat guna menyediakan kebutuhan bibit (*quality native*) dan ayam lokal galur murni (*pure line*) untuk pembentukan *commercial stock*, 2) mengembangkan pabrik pakan mini di sentra-sentra produksi peternakan guna memanfaatkan bahan ransum lokal dan hasil samping pertanian atau industri pertanian.

Menurut *Davis Beckmann* 2005, "Kendala utama dalam upaya melawan kelaparan dan kemiskinan adalah kurangnya komitmen politik". Komitmen politik yang dimaksud adalah pemerintah, sehingga

diperlukan penguatan kapasitas institusi pada fokus peningkatan kesejahteraan. Dalam hal ini pemerintah harus betul-betul fokus mendesain perencanaan, melayani, dan menjalin kemitraan strategis antara pemerintah dengan LSM, tokoh agama, petani, dan swasta agar turut serta berperan dalam tugas-tugas pemerintah.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan peternakan, satu hal yang perlu diperhatikan adalah struktur pasar yang melibatkan kebijakan pemerintah dengan legalitas SDM yang disertai pengawasan (*check and balance*) yang memadai. Banyaknya peternak yang berada pada posisi sebagai korban dari situasi pasar, perlunya sistem pemasaran yang berkeadilan dan efisien sebagai upaya melakukan revolusi pemasaran. Faktor-faktor penting sistem pemasaran yang berkeadilan dan efisien adalah : 1) imperatif pemerintah (keberpihakan pemerintah terhadap pertanian

Strategi Peningkatan Kesejahteraan Peternak



Gambar 3. Strategi peningkatan kesejahteraan peternak berbasis agroekologi

dan petani), 2) pendidikan dan pelatihan, 3) teknologi tepat guna dan pendampingan, 4) sistem informasi, 5) infrastruktur, dan 6) moralitas.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Peternakan salah satu prospek yang bagus dan dapat dikembangkan dalam rangka kemandirian pengadaan bahan pangan sumber protein hewani, Oleh karena itu perlu disusun suatu strategi pengembangan peternakan modern berbasis agroekologi untuk meningkatkan kesejahteraan peternak, antara lain: 1) melakukan restrukturisasi pengembangan peternakan dari ekstensif menjadi intensif

dalam rangka menerapkan konsep peternakan sehat dan sejahtera, 2) meningkatkan skala usaha peternakan guna meningkatkan pendapatan petani, 3) membangun perbibitan yang ditangani oleh pemerintah daerah setempat guna menyediakan kebutuhan bibit unggul (*quality native*) dan galur murni (*pure line*) untuk pembentukan *commercial stock*; 4) mengembangkan pabrik pakan mini di sentra-sentra produksi peternakan lokal guna memanfaatkan bahan ransum lokal dan hasil samping pertanian atau industri pertanian, 5) mengembangkan peternakan melalui pembentukan kelompok-kelompok ternak dengan pendampingan baik teknologi maupun kebijakan

serta didukung dengan permodalan dengan bantuan subsidi bunga dan sejenisnya, 6) melaksanakan penelitian dan pengembangan diprioritaskan pada aspek perbaikan kualitas bibit, pemanfaatan bahan ransum nonkonvensional dan hasil samping pertanian dan industri pertanian, sosial-ekonomi atau kelembagaan yang sekaligus berfungsi sebagai pendamping kebijakan pemerintah daerah dalam mengembangkan peternakan, 7) kebijakan industri yang difokuskan pada agroindustri pedesaan untuk mendekatkan industri ke sentra produksi di pedesaan, dan 8) perlunya revolusi sistem pemasaran di desa menjadi sistem pemasaran yang berkeadilan dan efisien agar peternak tidak dirugikan.